

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan atau doktor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dari hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 24 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan

Supriyanto

NIM. 4415106991

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial

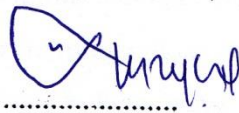


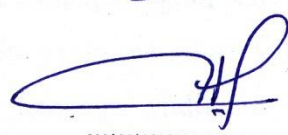

Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si

NIP. 19630412 199403 1002

### TIM PENGUJI

No. Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. Nurzengky Ibrahim, M.M</u> NIP. 19611005 198703 1005 Ketua Sidang		18-07-2016
2. <u>Sri Martini, S.S., M.Hum</u> NIP. 19720324 199903 2001 Sekretaris Sidang		18-07-2016
3. <u>Dra. Yasmis, M.Hum</u> NIP. 19530627 198203 2001 Penguji Ahli		18/07-2016
4. <u>Dr. Abdul Syukur, M.Hum</u> NIP. 19691010 200501 1002 Pembimbing I		20-07-2016
5. <u>Adi Nusferadi, S.S., M.Hum</u> NIP. 19671030 200501 1001 Pembimbing II		21-07-2016

Tanggal Lulus : 24 Juni 2016

## **ABSTRACT**

**Supriyanto**, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia Escorting Democracy 2003-2014. Essay. Jakarta: History Education Studies Program, Faculty of Social Sciences, University State of Jakarta, in 2016.

This study aims to reveal the development of Indonesia's Constitutional Court in order to escorting the democracy and the constitution of the Republic of Indonesia at the time of the Reformation in Indonesia. The method used is the method Historically, that is by determining the theme, gathering resources, verification, interpretation and historiography.

The study concluded that the Constitutional Court was established because of the demands in the reform era to uphold the rule of law in Indonesia. One concrete manifestation to improve the rule of law in Indonesia is the establishment of legal institutions capable of escorting, democratic control and protect the constitutional rights of citizens.

The formation of the Constitutional Court began with the amendment of the 1945 Constitution of the third amendment in 2001, but the Constitutional Court has become an institution in 2003. The Constitutional Court has nine constitutional judges chosen by the three state agencies that consists of the House of Representatives representing the legislature, the president who represents the executive branch and the Supreme Court representing the judiciary. Of each institution chose three constitutional judges who served for 5 years as a constitutional judge.

The development of the Constitutional Court as a new state institution, not freed by the challenges it faces. This can be seen when the term of leadership Akil Mochtar as the chairman of the Constitutional Court, public confidence in the institutions is reduced due to the Constitutional Court chairman Akil Mochtar entangled in corruption cases. However, cases that hit Akil Mochtar does not interfere with the performance of the Constitutional Court in performing its duties in maintaining the democratic pillars of the Indonesian nation.

With the Constitutional Court, which was formed in 2003 to bring a good change in the democratic system in Indonesia, it can be proved that when a disputed presidential election by the people in 2014, the political atmosphere in the country is very hot so it may cause a conflict. But with the decision of the Constitutional Court it does not pose a significant conflict and the decision of the Constitutional Court can be accepted by all walks of society.

**Key Words : The Constitutional Court, Democracy.**

## **ABSTRAK**

**Supriyanto**, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengawal Demokrasi 2003-2014. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka mengawal demokrasi dan konstitusi Republik Indonesia pada masa Reformasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Historis, yaitu dengan menentukan tema, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk karena adanya tuntutan dalam era Reformasi untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Salah satu wujud nyata untuk meningkatkan supremasi hukum di Indonesia adalah dengan dibentuknya lembaga hukum yang mampu mengawal, mengontrol demokrasi dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimulai dengan adanya amendemen UUD 1945 perubahan ketiga tahun 2001 namun Mahkamah Konstitusi baru menjadi sebagai lembaga pada tahun 2003. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang dipilih oleh tiga lembaga negara yang terdiri dari DPR yang mewakili lembaga legislatif, Presiden yang mewakili lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung yang mewakili lembaga yudikatif. Dari masing-masing lembaga memilih 3 orang hakim konstitusi yang menjabat selama 5 tahun sebagai hakim konstitusi.

Perkembangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang baru, tidak terbebas dengan adanya tantangan yang dihadapinya. Hal tersebut dapat dilihat ketika pada masa kepemimpinan Akil Mochtar sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut menjadi menurun

karena ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terjerat kasus korupsi. Namun kasus yang melanda Akil Mochtar tersebut tidak mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga pilar demokrasi bangsa Indonesia.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk pada tahun 2003 membawa perubahan yang baik dalam sistem demokrasi di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa ketika terjadi sengketa pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2014, suasana politik dalam negeri sangat panas sehingga dapat menimbulkan suatu konflik. Namun dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi hal tersebut tidak menimbulkan konflik yang berarti dan keputusan Mahkamah konstitusi tersebut dapat diterima oleh seluruh kalangan Masyarakat.

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi.**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Life for Freedom and Rest in Peace”*

Aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang telah mendidik dan mendoakan kesuksesan saya, dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga tulisan ini dapat terukir bagaikan prasasti yang abadi.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Atas izin Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengawal Demokrasi 2003-2014”.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Selama proses penulisan, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

Dr. Abdul Syukur, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, atas kesabaran, ketelitian, dan kebaikannya selama membimbing peneliti. Adi Nusferadi, S.S, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, bantuan, serta saran kepada peneliti. Dr. Nurzengky Ibrahim, M.M. Selaku Ketua sidang skripsi yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi. Sri Martini, S.S., M.Hum. Selaku Sekretaris yang telah memberikan kritik yang membangun dalam tulisan peneliti. Dra. Yasmis, M.Hum.



Selaku Penguji ahli yang telah memberikan kritik dan sarannya untuk skripsi peneliti.

Kepada kedua orang tua saya yang tercinta. Terimakasih sebesar-besarnya untuk cinta, kasih sayang dan doanya untuk kesuksesan saya. Dengan penuh kesabaran selalu menunggu untuk anaknya menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Kakak saya Sugiyo, S.T. yang telah mendukung dan ikut juga ambil bagian dalam kehidupan saya yang menyarankan saya agar masuk kuliah di jurusan Sejarah.

Teman-teman seperjuangan Sejarah Nonreg Angkatan 2010, terimakasih untuk kebersamaan tawa canda selama lebih dari 5 tahun ini. Ucapan terimakasih khusus untuk Andi Anang Firmansyah yang selalu baik dalam membantu mencari sumber buku untuk skripsi ini,

Terakhir, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih mengandung kekurangan. Oleh sebab itu penulis berharap agar dapat diberikan opini, sumbangan argumen dan saran dalam rangka mengoreksi penelitian ini secara lanjut. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 24 Juni 2016

S

## **DAFTAR SINGKATAN**

**DKPP** : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

**DPR** : Dewan Perwakilan Rakyat

**DPT** : Daftar Pemilih Tetap

**KPK** : Komisi Pemberantasan Korupsi

**KPU** : Komisi Pemilihan Umum

**MA** : Mahkamah Agung

**MK** : Mahkamah Konstitusi

**MPR** : Majelis Permusyawaratan Rakyat

**Pemilu** : Pemilihan Umum

**Pilkada** : Pemilihan Kepala Daerah

**Pilpres** : Pemilihan Presiden

**RUU** : Rancangan Undang-Undang

**TPPU** : Tindak Pidana Pencucian Uang

**Tipikor** : Tindak Pidana Korupsi

**UU** : Undang-Undang

**UD** : Undang-Undang Dasar

## DAFTAR ISTILAH

Ad hoc	: Sesuatu yang bersifat tidak permanen atau sementara.
Amandemen	: Perubahan undang - undang.
Check and Balance	: Prinsip dalam hukum mengenai sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Impeachment	: Pemberhentian dari jabatan.
Judicial review	: Menguji kesahihan dan daya laku produk – produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku.
Konstitusi	: Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan.
Separation of power	: Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sistem presidensial	: Sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan parlementer.
Supremasi	: Kekuasaan tertinggi.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	: Strukturisasi Ketetaneanaan Sebelum Perubahan UUD 1945 .....	14
<b>Tabel 2</b>	: Strukturisasi Ketetaneanaan Sesudah Perubahan UUD 1945 .....	14
<b>Tabel 3</b>	: Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi .....	17
<b>Table 4</b>	: Perkara yang Ditangani dan Penyelesaian Perkara dalam MK 2003-2014 .....	32
<b>Tabel 5</b>	: Rekapitulasi Suara Pilkada Kab. Empat Lawang .....	45
<b>Tabel 6</b>	: Rekapitulasi Suara Pilkada Palembang .....	46
<b>Tabel 7</b>	: Rekapitulasi Suara Pilkada Morotai .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1 :</b> Undang - Undang Dasar 1945 .....	77
<b>Lampiran 2 :</b> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi .....	102
<b>Lampiran 3 :</b> Foto Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	125
<b>Lampiran 4 :</b> Foto Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Ketika Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK .....	126
<b>Lampiran 5 :</b> Foto Calon Presiden 2014 Prabowo Subianto, Ketika Sedang Menggugat Kemenangan Calon Presiden 2014 Joko Widodo di Gedung Mahkamah Konstitusi .....	127